

JSAP: Journal Syariah and Accounting Public
ISSN: 2622-3538
Available Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/JSAP/index
Vol. 7, No. 2 Desember 2024
DOI: 10.31314/jsap.2024

ANALISIS REALISASI ANGGARAN BELANJA PEGAWAI DI DINAS PERTANIAN KABUPATEN GORONTALO

Fitria Melynsyah Yusuf[1], Yuwin Ali[2], Nur Iman Saputro Djahuno[3]
1. Program Studi Akuntansi Universitas Muhamadiyah Gorontalo
2. Program Studi Akuntansi Universitas Muhamadiyah Gorontalo
3. Program Studi Akuntansi Universitas Muhamadiyah Gorontalo

Email; nurimansaputro93@gmail.com

Info Artikel: Diterima: 20 Agustus., Disetujui:25 Agustus, Publish 30 Desember

ABSTRACT:
This research aims to analyze the realization of employee expenditure budgets based on the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 102/PMK.02/2018 concerning the classification of employee expenditure budgets at the Gorontalo Regency Agriculture Service. This research uses descriptive qualitative methods with observation techniques, documentary interviews and triangulation. The results of this research conclude that the realization of the Employee Expenditure Budget is based on Minister of Finance regulations. So, with the management of allowances, protection and increasing regional income which causes silpa, the remaining budget is then allocated in the following year.

keywords: Employee Expenditure Budget Realization, Budget Classification

ABSTRAK:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realisasi anggaran belanja pegawai apakah berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.02/2018 tentang klasifikasi Anggaran Belanja Pegawai di Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara dokumentasi dan triangulasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Realisasi Anggaran Belanja Pegawai telah berdasar pada peraturan menteri keuangan. Sehingga dengan adanya pengelolaan tunjangan, perlindungan dan meningkatnya pendapatan daerah yang menimbulkan silpa, sisa anggaran lebih kemudian dialokasikan pada tahun berikutnya.

kata kunci: Realisasi Anggaran Belanja Pegawai, Klasifikasi Anggaran

PENDAHULUAN

Tujuan pemerintah pusat untuk memajukan kesejahteraan rakyat melalui penganggaran. Anggaran adalah rencana kuantitatif yang mencakup aspek keuangan dan non-keuangan. Berdasarkan istilah tersebut, maka fungsi utama anggaran adalah salah satu alat perencanaan. Sistem anggaran adalah prosedur dan praktik untuk seperangkat komponen anggaran yang saling terkait. Komponen anggaran meliputi persiapan anggaran, penetapan sasaran anggaran, revisi anggaran, evaluasi anggaran, dan umpan balik anggaran (Musim Dingin 2019).

Pelaksanaan suatu program atau agenda yang ingin memenuhi kebutuhan kewenangan berdasarkan Peraturan Anggaran Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2019 merupakan bentuk pengelolaan dana pemerintah yang terbuka dan dilakukan dengan cara yang mudah dipahami. untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Keputusan pemerintah tersebut dengan tegas menyatakan bahwa APBN adalah bentuk pengelolaan keuangan pemerintah, yang dapat diartikan sebagai anggaran pendapatan negara merupakan tanggung jawab negara untuk kesejahteraan rakyat, peran penting anggaran sebagai alat untuk stabilitas, distribusi. dan atribusi. sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi, dan evaluasi kinerja. Oleh karena itu, laporan pelaksanaan anggaran merupakan salah satu bentuk akuntabilitas daerah yang sangat penting.

Tujuan laporan pelaksanaan anggaran agar dapat menyajikan laporan keuangan sedemikian rupa sehingga menguraikan berbagai komponen pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan belanja dari belanja, yang diperlukan untuk pengelolaan pendapatan yang adil. dalam presentasi berorientasi plus atau defisit. Moermahadi (2017:02) LRA menyajikan gambaran sumber, sumber daya, pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan pelaksanaan-nya dalam satu periode pelaporan.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo peneliti menemukan permasalahan yang

mana pada Analisis Realisasi Anggaran Belanja Pegawai yang dianggarkan dari tahun 2018 hingga 2020 iyalah; tahun 2018 sebesar Rp. 11.259.512.717,00 sedangkan di tahun 2019 sebesar Rp. 13.849.422.741,00 dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 14.499.128.718,00. dan anggaran tersebut digunakan untuk Anggaran Belanja Pegawai tepatnya terhadap penerimaan gaji pokok pegawai. Akan tetapi anggaran yang terpakai di tahun 2018 sebesar Rp10.960.533.189 sedangkan tahun 2019 sebesar Rp.13.591.789.191 dan tahun 2020 sebesar Rp13.462.473.167,00. Sehingga masih terdapat sisa lebih Anggaran Belanja Pegawai yang tidak terealisasi yaitu sekitar Rp. 298.979.528 di tahun 2018, selanjutnya Rp. 257.633.550 di tahun 2019, dan Rp.1.036.655.555,00 di tahun 2020. Hasil pengamatan lainnya kurangnya keterangan data yang mengungkapkan secara rinci berdasarkan pembagian Anggaran Belanja Pegawai mengenai pengalokasian dana yang jelas dari Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo mengenai selisih lebih anggaran.

Berdasarkan klasifikasi belanja pegawai dimana semua pengeluaran daerah pada suatu periode anggaran secara umum belanja pada APBD. Belanja Pegawai merupakan pengeluaran daerah untuk orang/ personel yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau dengan kata lain merupakan biaya tetap pegawai. Belanja pegawai meliputi: Biaya gaji dan tunjangan, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan bagi pegawai serta dewan. Contohnya gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan. Selanjutnya perawatan dan pengobatan, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pengeluaran kesehatan pegawai dan dewan yang ditanggung pemerintah daerah, dan pengobatan lanjutan luar daerah. Kemudian pengembangan sumber daya manusia, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menunjang kualitas sumber daya manusia. Contohnya biaya beasiswa bantuan tugas belajar ikatan dinas, biaya kursus keterampilan dan *job training*.

Selanjutnya Perjalanan Dinas merupakan pengeluaran untuk biaya perjalanan pegawai dan dewan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik, biaya ini terdiri dari; biaya perjalanan dinas, yaitu pengeluaran perjalanan pegawai atau dewan yang menjalankan tugas. Contohnya biaya perjalanan dinas dalam daerah dan biaya perjalanan dinas luar daerah, biaya perjalanan pindah, yaitu pengeluaran perjalanan pegawai yang pindah. Contohnya biaya perjalanan pindah dalam daerah dan biaya perjalanan pindah luar daerah, biaya pemulangan pegawai yang gugur, dipensiunkan, dan cuti besar. Contohnya biaya pemulangan dipensiunkan, biaya pemulangan dipensiun luar daerah, dan biaya pemulangan pegawai yang telah gugur (Rahayu 2016).

Peneliti menggunakan Permen Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.02/2018 tentang klasifikasi Anggaran, Belanja Pegawai dan diperkuat oleh Nilasari (2016) tentang penggajian, tunjangan, penghargaan, dan perlindungan. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Realisasi Anggaran Belanja Pegawai di Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo.

Tinjauan Pustaka

Permen Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018 tentang klasifikasi Anggaran Belanja Pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam dan luar negeri, baik pada pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS dan/atau Non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah.

METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ialah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Suyinton (2018:27) Penelitian deskriptif yang dimaksud adalah penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi. Sedangkan pendekatan

kualitatif adalah metode penelitian yang dilakukan untuk menggali data berdasarkan apa yang diucapkan, dirasakan dan dilakukan oleh informan atau sumber data, dan bersifat *"perspektif emic"* artinya kebenaran data yang didapatkan dari beberapa informan terkait Analisis Realisasi Anggaran Belanja Pegawai di Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 hingga 2020 dan bukan berdasarkan pada asumsi peneliti. Lokasi Penelitian ini dipusatkan di Pegawai di Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan dari bulan september sampai dengan bulan oktober.

Teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Keseluruhan proses ini berlangsung pada saat penelitian dimana analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. (1) Reduksi data (*Reduction Data*) adalah tahap yang dilakukan peneliti dalam proses pengumpulan maupun penyajian data, dimana apabila dilihat ada data yang kurang relevan maka akan dilakukan reduksi atau penyesuaian data. Biasanya dalam bentuk penafsiran. (2) Penyajian data (*data display*) adalah tahapan dimana peneliti memilih bentuk penyajian yang diinginkan, dengan pertimbangkan penafsiran dan unsur komunikatif. **(3)** Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion or Verification*) adalah tahapan akhir dimana penelititelah sampai pada suatu kesimpulan mengenai data yang diperoleh.

HASIL PENELITIAN

1. Permen Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018

Permen Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.02/2018 tentang klasifikasi anggaran belanja pegawai. Sesuai ungkapan beberapa informan terkait kesesuaian penyusunan gaji pokok telah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Kemudian dari apa yang peneliti dapatkan mengenai penyebab dari sisa lebih anggaran belanja pegawai, peneliti menemukan beberapa informan, yang mengungkapkan terdapat silpa pada anggaran belanja pegawai,

salah satu penyebabnya adalah peningkatan pendapatan daerah, sehingga timbulah silpa pada belanja pegawai, selanjutnya dari pernyataan beberapa informan terkait silpa pada kas daerah merupakan sisa lebih anggaran yang kemudian akan dialokasikan kembali pada penganggaran tahun berikutnya.

Hal ini dapat dilihat pada tabel yang tertera di bawah, yakni LRA belanja pegawai periode 2018 hingga 2020.

Tahun	Penganggaran	Realisasi	SILPA/SIKPA
2018	Rp.11.259.512.717	Rp.10.960.533.189	Rp .298.979.528
2019	Rp.13.849.422.741	Rp.13.591.789.191	Rp. 257.633.550
2020	Rp.14.499.128.718	Rp.13.462.473.167	Rp 1.036.655.555

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo,2022

Tabel LRA diatas menggambarkan bahwa anggaran yang dianggarkan memiliki silpa, yakni di tahun 2018 terdapat silpa sebesar Rp. 298.979.528, kemudian di tahun berikutnya 2019 terdapat Rp.257.633.550, kemudian di tahun 2020 juga terdapat silpa sebesar Rp. 1.036.655.555. Adapun Silpa menurut Sitti (2016). Semakin besar silpa menunjukkan kekurang cermatan dalam penganggaran (perencanaan yang kurang baik) atau kelemahan dalam pelaksanaan anggaran. Bisa dikatakan anggaran tidak habis dipergunakan pada periode yang ditentukan. Dari hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa anggaran yang menjadi sisa lebih anggaran menjadi silpa di kas daerah, dan yang menyebabkan adanya silpa dalam LRA di Dinas Pertanian diakibatkan oleh pendapatan daerah yang meningkat, sehingga dana untuk belanja pegawai bertambah, dikarenakan dana pendapatan daerah yang dialokasikan pada belanja pegawai, hal ini menyebabkan timbulnya pembengkakan dana pada anggaran belanja pegawai yang telah dianggarkan oleh pemerintah daerah, dan menjadi silpa pada kas daerah, kemudian dana tersebut dialokasikan pada penganggaran di tahun berikutnya.

2. Nilasari, Sistem Penggajian, tunjangan penghargaan dan perlindungan

Dalam hal ini mengenai gaji atau upah menjadi sebuah balas jasa yang penting artinya bagi karyawan maupun perusahaan.

Karyawan membutuhkan gaji untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. melalui gaji yang cukup, kehidupan karyawan menjadi lebih baik Hal ini harus disesuaikan dengan peraturan pemerintah yang ada, dan berlaku saat ini.

a Tunjangan

Menurut Nilasari (2016:168-171) selain gaji PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas. Tunjangan yang diberikan terdiri atas tunjangan kinerja dan tunjangan kehamilan. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo apakah semua tunjangan diterima oleh pegawai, dari hal ini peneliti menemukan bahwa tunjangan yang ada diterima semuanya baik itu tunjangan fasilitas, keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, tunjangan umum dan tunjangan resiko perjalanan dinas. Namun untuk tunjangan perjalanan dinas belum maksimal dilakukan hal ini yang diungkapkan oleh para informan. Setiap ASN/PNS menerima tunjangan terutama bagi PNS yang melaksanakan tugas lapangan ataupun di daerah terpencil, adapun halnya kegiatan yang berhubungan dengan pengawasan pemerintah terhadap kinerja lapangan, itupun diberikan tunjangan resiko perjalanan dinas tetapi dalam waktu beberapa tahun kemarin kegiatan pengawasan dikurangi demi mencegah penularan covid 19.

Dari hasil penelitian secara mendalam dapat disimpulkan setiap tunjangan yang disediakan oleh pemerintah telah direalisasikan adapun halnya peneliti menemukan berdasarkan ungkapan wawancara diatas bahwa tunjangan resiko terutama bagi PNS yang melakukan tugas lapangan ataupun di daerah terpencil mendapatkan tunjangan, akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir kegiatan yang sering dilakukan, yakni kegiatan turun lapangan kurang dilakukan yang menyebabkan anggaran yang diangarkan untuk kegiatan tersebut tak terealisasi secara maksimal yang berakibat pada terdapatnya sisa lebih anggaran.

b Perlindungan

Menurut Nilasari (2016:168-171) pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada PNS berupa jaminan kesehatan, kecelakaan

kerja, kematian dan jaminan hukum. Dari hasil wawancara peneliti, di Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo membahas tentang apakah pemerintah memberikan perlindungan sesuai dengan apa yang telah diatur. Peneliti menemukan dari pengungkapan beberapa informan bahwa setiap perlindungan yang diberikan oleh pemerintah telah direalisasikan, namun terhadap perlindungan jaminan hukum lebih mengarah ke penanganan hukumnya bukan direalisasikan dalam bentuk pemberian materi, dari hal tersebut sejauh ini untuk penanganan hukum belum terealisasi dikarenakan tidak adanya PNS yang melakukan pelanggaran hukum.

Peneliti menarik kesimpulan bahwa di Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo telah menyelenggarakan perlindungan sesuai dengan apa yang telah diatur dan hal ini sejalan dengan apa yang tertera di atas. Namun, sebagaimana perlindungan yang telah diatur terdapat salah satu perlindungan yang belum terealisasi dan menjadi penyebab terjadinya silpa pada anggaran yang telah dianggarkan oleh pemerintah, perlindungan tersebut merupakan perlindungan hukum, dalam perlindungan hukum pemerintah menyediakan berupa penanganan terhadap hukum bagi pegawai yang bersangkutan demi memenuhi kebutuhan pegawai yang terjerat dalam permasalahan hukum dan hal ini sepenuhnya didanai oleh pemerintah. Yang mana di Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo tidak terdapat pelanggaran atau karyawan yang mengalami masalah hukum, maka anggaran yang merupakan tanggung jawab pemerintah untuk didistribusikan pada perlindungan hukum belum direalisasikan.

Dari pembahasan di atas peneliti menyimpulkan secara keseluruhan melihat Analisis Realisasi Anggaran Belanja Pegawai di Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo bahwa, telah sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang berlaku, Sehingga dengan adanya Pendapatan daerah, mengakibatkan sisa lebih anggaran yang ada pada LRA timbullah silpa, yang kemudian silpa tersebut akan dianggarkan pada tahun berikutnya.

Kemudian sesuai dengan pendapat yang diungkapkan oleh Nilasari, mengenai penggajian, tunjangan, penghargaan, dan perlindungan, yang menyebabkan silpa yakni tunjangan perjalanan dinas, masih kurang maksimal direalisasikan pada masa-masa pandemic covid 19, dan terhadap perlindungan hukum, yang sejauh ini belum terealisasi karena belum adanya PNS yang terjerat kasus hukum, terkhusus pegawai dinas pertanian.

KESIMPULAN & SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: Telah sesuai dengan Permen Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.02/2018. Mengenai klasifikasi anggaran belanja pegawai. Seperti halnya penggajian dan penghargaan, pemerintah telah melakukan penggajian maupun pemberian penghargaan secara maksimal, hal ini dilakukan demi meningkatkan kreativitas PNS. Adapun yang belum sesuai atau sudah terealisasi namun belum secara maksimal, yakni pada tunjangan dan perlindungan tidak terealisasi secara maksimal. Dikarenakan kinerja lapangan yang dibatasi demi memperkecil resiko PNS terdampak *covid* 19 yang terjadi di beberapa tahun terakhir tepatnya di tahun 2018 hingga 2019 yang lalu. kemudian terhadap perlindungan juga belum terealisasi secara maksimal, dikarenakan anggaran untuk perlindungan hukum tidak terpakai sehingga terdapat selisih lebih anggaran di tahun 2018-2019, serta dengan adanya pendapatan daerah mengakibatkan timbulnya pembengkakan dalam anggaran belanja pegawai yang telah dianggarkan. Poin-poin di atas yang menjadi sebab mengapa timbul silpa pada kas daerah.

Maka saran yakni: (1) Bagi instansi terkhusus Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo dapat memaksimalkan penggunaan anggaran pada mata anggaran yaitu biaya lain-lain sehingga dapat memaksimalkan anggaran di satu tahun periode anggaran. (2) Penulis menyarankan untuk peneliti selanjutnya lebih mendalami mengenai Analisis Realisasi Anggaran yakni berdasarkan Peraturan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 102/PMK.02/2018 tentang klasifikasi Anggaran Belanja Pegawai

Daftar Pustaka

Almudi, A. (eds,1). (2017). *Teknik Melakukan dan Melayani Wawancara.* Bandung: Kaifa, p: 66.

A mir, (eds,2). (2019) *Birokrasi Akuntansi Kinerja.* Yogyakarta: cv budi utama, p:85

Fadilah Amin, (eds,1). (2019) *Penganggaran di Pemerrintah Daerah.* Malang: UB Pres, p:81

Halkadri fira, (eds,1).(2019) *Analisis Analisis Neraca dan Laporan realisasi anggaran pemerintah daerah.* purwokerto; p: 37

Hantono Dkk, (2021) *Akuntansi Sektor Publik.* bandung; CV. Media Sains Indonesia, p;2

Hantono Dkk, (2021) *Akuntansi Sektor Publik,* bandung; CV. Media Sains Indonesia, p;61

M. Fuad, (eds 1). (2020) *Anggaran Perusahaan.* Jakarta: Gramedia Pustaka, p:2

Rosmaida Tambun, (eds 1). (2020). *Penganggaran Perusahaan*, Medan; Pt. Rel Karir Pembelajaran, p;02

Dr. H. A. Rusdiana, MM & Drs. Nasihudin, M. Pd. (2018). Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Penelitian, Bandung; Pusat Penelitian dan Penerbitan, p; 20-25

Fadilah, 2018. *Strategi Komunikasi Satuan Tugas Terhadap Penerapan Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan covid-19 Dimasa New Normal di Kecamatan Rappocini Kota Makasar*: program studi ilmu ekonomi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik 1-113

Intan, 2020, *Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bagi pekerja di Pt. Handal Aluminium Sukses Cirebon.* Jawa Barat, fakultas hukum 55

Juwita S.W. 2019 *Pengaruh Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja modal Terhadap penetapan pagu indikatif di lingkuan kementrian agama kabupaten banggai.* Jurnal Katalogis 5 (5) 36-48

Mursyidin. 2017. *Pengaruh Pemberian Penghargaan Terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Kebudayaan dan Pemuda Kabupaten Aceh Barat,* jurnal public policy 3 (1) 115-124

Umi Choiunnisa, 2020, Analisis Biaya dan Manfaat Pengelolaan Belanja Pegawai Terpusat di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, simposium nasional keuangan Negara, 858

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 20 Tahun 2019 Anggaran Pendapatan Belanja Negara

Peraturan Pemerintah Dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Mengenai Anggaran Daerah APBD

Peraturan Pemerintah Dalam Negri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 mengenai Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai